

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR       TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rancangan rencana kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Painan, Juli 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**TAMSIR, S.H., M.M**  
NIP. 19670312 198803 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN BERJALAN.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II 2022 BKPSDM .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II .....	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab Pesisir Selatan.....	17
Tabel.3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021-2026.....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia aparaturnya. Pengembangan sumber daya aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor-faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen dibidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif. Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Diawali dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi : a. Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN; b. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan c. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN; b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; c. Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN.

Rencana Kerja BKPSDM mengacu pada Rencana Strategis BKPSDM yang diselaraskan dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan Kepegawaian Negara serta rencana kerja BKD Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dituangkan kedalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dan RKA OPD sebagai usulan pembiayaan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Ranperda APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan pemerintah daerah umumnya.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan semula dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang / struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun

sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I    PENDAHULUAN**

### **1.1.    Latar Belakang**

Berisikan tentang dasar-dasar penyusunan dokumen Renja yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan dokumen perencanaan.

### **1.2.    Landasan Hukum**

Berisikan tentang dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasasn dan acuan dalam penyusunan Renja

### **1.3.    Maksud dan Tujuan**

Berisikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan BKPSDM sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ASN BKPSDM

### **1.4.    Sistematika Penulisan**

Berisikan tentang isi dan bagian-bagian dalam Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sehingga memudahkan dalam mendalami penyusunan dokumen Renja ini

## **BAB II    HASIL    EVALUASI    RENCANA    KERJA    BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN BERJALAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat daerah Triwulan II Tahun 2022  
Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022.  
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Berisikan tentang analisis kinerja pelayanan perangkat daerah kondisi triwulan II Tahun Anggaran 2022
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN BERJALAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan II Tahun 2022**

Selama Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Fasilitas kunjungan tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Kepegawaian Daerah**

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN

## **3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

:



3	5	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum		423,857,492		207,108,021		107,986,895		-		-	0.00	315,094,916		74.34	
1.a	5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1.00	5,500,220	0.25	1,972,740	0.25	1,963,500				0.50	3,936,240	50.00	71.57	
2.b	5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket	2.00	45,284,266	0.00	-	1.00	13,000,000				1.00	13,000,000	50.00	28.71	
3.c	5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1	1.00	36,713,006	0.25	8,741,194	0.25	3,873,012				0.50	12,614,206	50.00	34.36	
4.d	5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket	1.00	31,500,000	0.25	6,947,600	0.25	10,325,000				0.50	17,272,600	50.00	54.83	
5.e	5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	TJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1	1.00	5,400,000	0.25	900,000	0.25	1,350,000				0.50	2,250,000	50.00	41.67	
6.f	5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12.00	8,550,000	0.00	-	0.00	-				0.00	-	0.00	0.00	
7.g	5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan	36.00	290,910,000	24.00	188,546,487	24.00	77,475,383				48.00	266,021,870	133.33	91.44	
4	5	03	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>137,978,170</b>		<b>33,567,062</b>		<b>29,993,300</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>63,560,362</b>		<b>46.07</b>
1.a	5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	89,265,363	3.00	27,355,452	3.00	22,002,850				6.00	49,358,302	50.00	55.29	
2.b	5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	48,712,807	3.00	6,211,610	3.00	7,990,450				6.00	14,202,060	50.00	29.15	



5	5	03	01	2	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>199,900,724</b>		<b>27,676,147</b>		<b>61,548,600</b>		-	-	<b>0.00</b>	<b>89,224,747</b>		<b>44.63</b>	
1.a	5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Kendaraan	7.00	104,375,760	2.00	17,731,147	2.00	16,768,100				4.00	34,499,247	57.14	33.05
2.b	5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 42	42.00	19,764,964	3.00	700,000	3.00	7,485,500				6.00	8,185,500	14.29	41.41
3.c	5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kntor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas : 1 Gedung	1.00	75,760,000	0.12	9,245,000	0.25	37,295,000				0.37	46,540,000	37.00	61.43
II	5	03	02				<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kesesuaian Kompetensi jabatan dengan Anjab</b>	<b>100.00</b>	<b>716,832,020</b>		<b>194,002,870</b>		<b>74,584,630</b>		-	-	<b>25.00</b>	<b>268,587,500</b>	<b>25.00</b>	<b>37.47</b>
1	5	03	02	2	01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>123,698,460</b>		<b>20,931,490</b>		<b>16,798,795</b>		-	-		<b>37,730,285</b>		<b>30.50</b>
1.a	5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK : 205 Dokumen	205.00	27,959,790	25.00	9,512,120	45.00	2,732,700				70.00	12,244,820	34.15	43.79
2.b	5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian : 313 Dokumen	313.00	16,016,270	78.25	3,436,470	80.00	-				158.25	3,436,470	50.56	21.46

3.c	5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian : 6000 Dokumen	6000.00	61,932,000	1450.00	7,325,900	3100.00	12,387,145					4550.00	19,713,045	75.83	31.83
4.d	5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian : 300 Dokumen	300.00	17,790,400	30.00	657,000	80.00	1,678,950					110.00	2,335,950	36.67	13.13
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Mutasi dan Promosi</b>			<b>363,651,620</b>		<b>152,068,180</b>		<b>30,123,570</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>182,191,750</b>		<b>50.10</b>	
1.a	5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah : 200 Dokumen	200.00	109,758,110	50.00	43,111,800	50.00	22,896,570					100.00	66,008,370	50.00	60.14
2.b	5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN : 1400 ASN	1400.00	118,632,090	350.00	75,472,270	650.00	7,227,000					1000.00	82,699,270	71.43	69.71
3.c	5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN : 100 Dokumen	100.00	135,261,420	25.00	33,484,110	25.00	-					50.00	33,484,110	50.00	24.76

3	5	03	02	2	03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>100,704,210</b>		<b>3,568,110</b>			-	-	-	<b>3,568,110</b>	<b>3.54</b>		
1.a	5	03	02	2	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya : 30 ASN	30.00	81,765,400	7.50	2,484,300	7.50	-			15.00	2,484,300	50.00	3.04
3.c	5	03	02	2	03	03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan : 1 Orang	1.00	18,938,810	0.25	1,083,810	0.25	-			0.50	1,083,810	50.00	5.72
4	5	03	02	2	04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>128,777,730</b>		<b>17,435,090</b>		<b>27,662,265</b>		-	-	<b>45,097,355</b>	<b>35.02</b>		
1.a	5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur : 6000 ASN	6000.00	19,639,950	1500.00	3,661,840	1900.00	2,287,560			3400.00	5,949,400	56.67	30.29
2.b	5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan : 20 ASN	20.00	109,137,780	5.00	13,773,250	5.00	25,374,705			10.00	39,147,955	50.00	35.87
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>																		<b>37.50</b>	<b>42.04</b>	
<b>Peringkat Kinerja</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>	



Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2022 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (SR). Realisasi pencairan dari pagu Rp.7.491.777.044,- terealisasi Rp.2.810.891.887,- atau 37,52% . Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
- Belum terlaksananya diklat / kursus /coaching clinic
- Banyak SPJ yang belum dinaikkan

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Sub Kepala Bidang agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	-	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
2	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Tersedianya Pembayaran/ Honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
4	Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
5	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Operasional BKPSDM selama 12 Bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

7	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 Bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 Bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
9	Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 Bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
10	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Instansi Terkait	-	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
11	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan Instansi Terkait selama 12 Bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
12	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
13	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-		10 jenis	12 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis		
14	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-		4 unit	2 unit	1 unit	4 unit	1 unit	4 unit	4 unit	8 unit		
15	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan	-		2 jenis	2 jenis	5 jenis	2 jenis	5 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		

16	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	-		73 unit	77 unit	82 unit	82 unit	82 unit	82 unit	82 unit	84 unit	
18	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-		-	12 kali	6 kali	6 kali	2 kali	6 kali	6 kali	-	
19	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek, Kursus Keterampilan dan Coaching Clinic	-		7 orang	-	20 orang	20 orang	-	-	20 orang	20 orang	Adanya perubahan
20	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Fungsional Pol PP	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	15 orang	-	15 orang	15 orang	-	-	15 orang	15 orang	Adanya perubahan
21	Jumlah peserta yang mengikuti Achievement Motivation Training (AMT)	-		100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-	
22	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No.1 th 1974 ttg perkawinan	-		100 orang	-	-	-	-	-	-	-	
23	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusunan TPP	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	222 orang	120 orang	-	-	-	-	-	250 orang	
24	Berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan festival langkisau	-		100%	1 event	6 event	-	1 event	-	5 event	-	



25	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	-		30 orang	30	30 orang	-	30 orang	-	0	30 orang	
26	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan	-		160 orang	66 orang	238	-	238	-	142	30 orang	
27	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi PNS	-		204 orang	238 orang	251 orang	142 orang	251 orang	142 orang	246	239 orang	
28	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	-		150 orang	148 orang	8 orang	126 orang	-	-	465 orang	400 orang	
29	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	-		60 orang	12 orang	-	-	-	-	7 orang	40 orang	
30	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS, PPPK	-		2110 orang	1666 orang	210 orang	277 orang	242 orang	132 orang	2188 orang	4089 orang	Adanya perubahan
31	Tercapainya kegiatan penyusunan rencana karir PNS, DUK dan Bazetting	-		30 buku	-	-	-	-	-	-	-	
32	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	-		1240 berkas	1600 berkas	1500 berkas	1500 berkas	1500 berkas	1500 berkas	1500 berkas	1500 berkas	
33	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	129 orang	275 orang	400 orang	530 orang	482 orang	530 orang	640 orang	600 orang	

34	Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	-		488 berkas	594 berkas	100 berkas	250 berkas	129 berkas	175 berkas	225 berkas	225 berkas	
35	Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP	-		6 kali	5 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	
36	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Baperjakat	-		14 kali	16 kali	23 kali	8 kali	23 kali	8 kali	15 kali	12 kali	
37	Jumlah kartu KPE yang didistribusikan	-		522 kartu	-	-	-	-	-	-	-	
38	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional	-		946 berkas	1050 berkas	-	-	-	-	-	-	
39	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Pensiun BUP, Janda/Duda dan APS	-		208 berkas	225 berkas	119 berkas	305 berkas	236 berkas	305 berkas	305 berkas	345 berkas	-
40	Jumlah Data PNS yang di Update dalam Jaringan Database	-		7178 data	7150 data	5000 data	2000 data	5000 data	2000 data	2700 data	2700 data	
41	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	-		57 kasus	48 kasus	31 kasus	36 kasus	31 kasus	36 kasus	35 kasus	25 kasus	
42	Jumlah peserta yang mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	-		13 orang	8 orang	27 orang	28 orang	27 orang	28 orang	74 orang	100 orang	

43	Jumlah Sumpah dan pelantikan jabatan yang dilaksanakan	-		-	-	16 orang	19 orang	14 orang	1 orang	237 orang	5 kali	
44	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	-		-	41 orang	235 orang	-	30 orang	-	235 orang	6 jabatan	
45	Tercapainya pemetaan potensi pejabat struktural	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	803 Orang	450 Orang	-	420 orang	-	-	-	185 orang	
46	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	-		-	105 orang	-	-	-	-	-	-	

### 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholders dan pemerintah sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan rancangan awal BKPSDM serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan evaluasi renja.

Adapun analisa masalah perubahan renja meliputi tiga analisa masalah, yaitu:

1. Terdapat usulan sebanyak 227 formasi untuk mengisi formasi PPPK Guru dan PPPK Non Guru dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Usulan Formasi PPPK Guru Sebanyak : 107 Formasi
  - b. Usulan Formasi PPPK Non Guru sebanyak :120 Formasi
2. Bahwa berdasarkan daftar pensiun PNS tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat rincian jumlah PNS pensiun sebagai berikut:
  - a. Pensiun PNS tahun 2021 sebanyak : 267 PNS
  - b. Pensiun PNS tahun 2022 sebanyak : 314 PNS

Berdasarkan data diatas terdapat sebanyak 571 PNS memasuki usia pensiun hingga Desember tahun 2022, sehingga pelaksanaan seleksi CASN untuk tahun 2022 menurut hemat kami merupakan hal yang mesti dilakukan untuk menutupi kekurangan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan.

Jadi untuk kelancaran pelaksanaan seleksi CASN untuk tahun 2022 dalam kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK tahun 2022, perlu dilakukan penambahan Anggaran sebesar Rp. 473.114.150.

3. Adanya Pelatihan kompetensi baik diklat / bimtek / coaching clinic / lain – lain yang diperlukan baik di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah:

**“TERWUJUDNYA MANAJEMEN ASN YANG PROFESIONAL DAN BERKINERJA TINGGI”.**

Tujuan yang telah dirumuskan diatas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Tujuan diatas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat *observe* yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
2. Meningkatnya manajemen system karir ASN berdasarkan merit system
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM

Sasaran yang ditetapkan diatas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan

melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selama periode 2021-2026. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tahun 2021-2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya manajemen ASN yang Profesional dan Berkinerja Tinggi		Indeks Profesionalitas ASN	56	57	57	58	58	58
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Kepegawaian	75%	80%	85%	90%	90%	90%
			Inovasi BKPSDM	1	1	1	1	1	1
2.		Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan merit system	% jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	25%	35%	50%	65%	85%	95%
3.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
503		KEPEGAWAIAN													5,939,454,504	6,758,867,864			8,019,492,492
5031		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5,222,622,484	5,583,843,904			6,114,891,142
503101	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													18,344,460	38,344,460			71,283,380
503111	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	7 dokumen	7 dokumen	90 %	90 %	0	0			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	30,500,000
503117	2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	7 dokumen	14 dokumen	90 %	90 %	18,344,460	38,344,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	40,783,380



5	0	0	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,442,541,638	4,472,541,638		4,668,952,115					
	3	1	02																			
	0	0	2.0	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	12 bulan	42 orang	100 %	100 %	4,357,030,735	4,357,030,735	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	4,533,152,115	
	3	1	2																			1
	0	0	2.0	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	12 bulan	36 Dokumen	100 %	100 %	85,510,903	115,510,903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100,800,000	
	3	1	2																			2
	0	0	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	35,000,000	
	3	1	2																			7
5	0	0	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0		145,000,000					
	3	1	05																			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
503151	2.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah pengadaan sarpras disiplin pegawai	Jumlah sapras disiplin pegawai, jumlah pakaian dinas, jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 paket	3 paket	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	50,000,000
503152	2.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah sapras disiplin pegawai, jumlah pakaian dinas, jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	60 stel	60 stel	3 paket	3 paket	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	50,000,000
503151	2.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah bimtek yang akan dilaksanakan	Jumlah sapras disiplin pegawai, jumlah pakaian dinas, jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 kali	5 kali	3 paket	3 paket	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	45,000,000

50	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										423,857,492	718,378,912				783,796,350		
3	1	06																		
50	0	2.0	0	Penyediaan	Persentase	Jumlah Paket	Tersedianya	Kab. Pesisir	100 %	100 %	18 jenis	1 Paket	12 bulan	100 %	5,500,220	10,500,220	Dana Transfer	Persentase	100 %	20,511,920
3	1	6	1	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat \Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Selatan, IV Jurai, Painan									Umum-Dana Alokasi Umum	Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		

5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat \Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	4 unit	2 Paket	12 bulan	100 %	45,284,266	104,784,266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	150,000,000
---	---	---	-----	---	--	--	--	---	--	-------	-------	--------	---------	----------	-------	------------	-------------	--------------------------------------	--	-------	-------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
503164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat \Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	37 jenis	1 Paket	12 bulan	100 %	36,713,006	36,713,006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	36,665,630	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
50310200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 jenis	1 Paket	12 bulan	100 %	31,500,000	31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	38,588,800			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
503166	2.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	3 jenis	1 Paket	12 bulan	100 %	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	5,400,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
503102008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	100 %	8,550,000	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	8,550,000	
503102009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, serta Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 dokumen	36 Laporan	12 bulan	100 %	290,910,000	523,781,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	524,080,000	



5033107	2.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					100,000,000	
5033172	2.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0	0	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100,000,000
5033108	2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										137,978,170	144,678,170					150,748,137	
5033182	2.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan serta Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	100 %	89,265,363	109,965,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	102,035,330
5033184	2.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan serta Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	100 %	4 orang	1 Laporan	12 bulan	100 %	48,712,807	34,712,807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	48,712,807

503109	2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										199,900,724	209,900,724		195,111,160			
5031092	2.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan,,	biilitasi Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, nSemua Kelurahan nanya tan	100 %	100 %	12 bulan	7 Kendaraan	12 bulan	100 %	104,375,760	104,375,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	141,456,160
5031096	2.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan,,	biilitasi Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, nSemua Kelurahan nanya tan	100 %	100 %	42 unit	42 unit	12 bulan	100 %	19,764,964	19,764,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	21,350,000

503199	2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pertambahan Nilai Kendaraan Dinas Operasional dan Lain-lainnya	Kab. Pesisir Selatan, IV Djuandri, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 Gedung	12 bulan	100 %	75,760,000	85,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	32,305,000
5032		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>											716,832,020	1,175,023,960		1,904,601,350		
503201	2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>											123,698,460	598,090,400		786,497,600		
503212	2.012	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah formasi yang diusulkan ke Menpan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, Sistem Informasi Kepegawaian dan Data Kepegawaian,	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 % 65 %		250 formasi	250 formasi	85 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	100,000,000

50	0	2.0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,, Sistem Informasi Kepegawaian dan Data Kepegawaian,	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %		205 Dokumen	85 %	100 %	27,959,790	520,351,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	500,000,000
50	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,, Sistem Informasi Kepegawaian dan Data Kepegawaian,	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	20 orang	313 Dokumen	85 %	100 %	16,016,270	10,016,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	52,068,700
50	0	2.0	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,, Sistem Informasi Kepegawaian dan Data Kepegawaian,	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	3000 data	6000 data	85 %	100 %	61,932,000	55,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	62,588,900

503	021	2.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,, Sistem Informasi Kepegawaian dan Data Kepegawaian,	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	225 berkas	300 Dokumen	85 %	100 %	17,790,400	11,790,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	36,840,000			
503	022	2.012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya database informasi ASN, naskah dan dokumen ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,, Sistem Informasi Kepegawaian dan Data Kepegawaian,	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	12 bulan	12 bulan	85 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	35,000,000			
503	0202	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>																<b>363,651,620</b>	<b>345,051,620</b>			<b>448,368,400</b>
503	022	2.021	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, serta Terlaksananya Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	5 kali	200 Dokumen	90 %	100 %	109,758,110	103,758,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	113,970,800			

5032020	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, serta Terlaksananya Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	1400 berkas	1400 ASN	90 %	100 %	118,632,090	112,632,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	184,643,700		
5032023	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, serta Terlaksananya Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 % 65 %	6 jabatan	100 Dokumen	90 %	100 %	135,261,420	128,661,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	30 % 65 %	149,753,900		
503203	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>														<b>100,704,210</b>	<b>109,704,210</b>			<b>517,103,700</b>
5032031	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Meningkat Kapasitasnya ASN, dan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 %	2 aturan	30 orang	80 %	100 %	81,765,400	75,765,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	30 %	75,765,400		

50	0	2.0	0	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan potensi Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Meningkat Kapasitasnya ASN, dan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 %	185 orang 52.5 skala	185 orang 52.5 skala	80 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	30 %	138,193,500
50	0	2.0	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Meningkat Kapasitasnya ASN, dan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 %	20 orang	20 orang	80 %	100 %	18,938,810	33,938,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	30 %	83,144,800
50	0	2.0	1	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	Meningkat Kapasitasnya ASN, dan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 %	1 kali	1 kali	80 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab	30 %	100,000,000

50	0	2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										128,777,730	122,177,730				152,631,650		
3	2	04																		
50	0	2.0	0	Pelaksanaan	Persentase	umlah Dokumen	Terlaksananya	Kab. Pesisir		30 %	2000 orang	6000 ASN	80 %	100 %	19,639,950	19,639,950	Dana Transfer	Persentase	30 %	30,356,750
3	2	4	2	Penilaian dan	Kesesuaian	Hasil Pelaksanaan	Pelaksanaan	Selatan,									Umum-Dana	Kesesuaian		
				Evaluasi Kinerja	Jabatan dengan	Penilaian dan	Penilaian dan	Semua									Alokasi Umum	Jabatan		
				Aparatur	Kompetensi	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja	Kecamatan,										dengan		
					jabatan dan Anjab	Aparatur	Aparatur, serta	Semua										Kompetensi		
							Meningkatnya	Kelurahan										jabatan dan		
							Disiplin ASN											Anjab		
50	0	2.0	0	Pengelolaan	Persentase	Jumlah PNS yang	Terlaksananya	Kab. Pesisir		30 %	100 orang	100 orang	80 %	100 %	0	0	PENDAPATAN	Persentase	30 %	50,000,000
3	2	4	5	Tanda Jasa Bagi	Kesesuaian	menerima satya	Pelaksanaan	Selatan,									TRANSFER	Kesesuaian		
				Pegawai	Jabatan dengan	lencana karya	Penilaian dan	Semua										Jabatan		
					Kompetensi	satya	Evaluasi Kinerja	Kecamatan,										dengan		
					jabatan dan Anjab		Aparatur, serta	Semua										Kompetensi		
							Meningkatnya	Kelurahan										jabatan dan		
							Disiplin ASN											Anjab		
50	0	2.0	0	Pembinaan	Persentase	Jumlah ASN yang	Terlaksananya	Kab. Pesisir		30 %	50 pasangan	20 ASN	80 %	100 %	109,137,780	102,537,780	Dana Transfer	Persentase	30 %	72,274,900
3	2	4	7	Disiplin ASN	Kesesuaian	Mendapatkan	Pelaksanaan	Selatan,									Umum-Dana	Kesesuaian		
					Jabatan dengan	Pembinaan	Penilaian dan	Semua									Alokasi Umum	Jabatan		
					Kompetensi	Kedisiplinan	Evaluasi Kinerja	Kecamatan,										dengan		
					jabatan dan Anjab		Aparatur, serta	Semua										Kompetensi		
							Meningkatnya	Kelurahan										jabatan dan		
							Disiplin ASN											Anjab		



50	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1,552,322,540	1,442,722,540		2,350,000,000
50	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1,552,322,540	1,442,722,540		2,350,000,000
50	4	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1,552,322,540	1,442,722,540		2,350,000,000

50	4	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Rata rata lamanya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	10.8 Orang	30 % 10.8 Orang	26 orang	10 Laporan	208 orang	100 %	1,552,322,540	1,442,722,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi jabatan dan Anjab Rata rata lamanya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	30 % 10.8 Orang	2,000,000,000
<b>TOTAL</b>															<b>7,491,777,044</b>	<b>8,201,590,404</b>			<b>10,369,492,492</b>	

## BAB IV PENUTUP

Pencapaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam era yang semakin rumit dan kompleks ditengah perubahan yang semakin dinamis menuntut Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus mempersiapkan diri secara terus menerus kearah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi daerah. Pembangunan dan pengembangan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis, pelaksanaan kegiatan yang diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LKj). Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai Perangkat Daerah pengelola kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun, guna sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan sehingga apa yang menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat tercapai.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 570 / 461 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan rencana program dan kegiatan, serta untuk mengoptimalkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 pada Triwulan ke IV, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
  10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

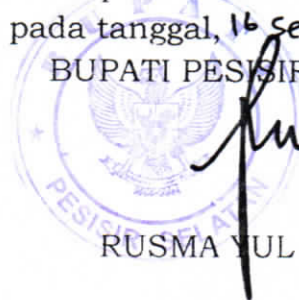
- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun berjalan;
- c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
- d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
- e. BAB V Penutup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal, 16 September 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



*[Handwritten signature]*

RUSMA YUL ANWAR